

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami telah berjalan secara fungsional melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan secara rutin menggunakan media spreadsheet. Sistem ini mencerminkan adanya pengelolaan keuangan yang terstruktur secara administratif, meskipun masih berbasis pencatatan kas sederhana dan belum mengacu pada sistem akuntansi yang terstandarisasi. Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami dinilai belum menyajikan laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan ketentuan ISAK No. 35. Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami hanya menyajikan laporan keuangan sebatas kas masuk dan kas keluar, sedangkan laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) belum disajikan.
2. Implementasi akuntabilitas dan transparansi pada pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islami
 - a. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami telah diterapkan melalui mekanisme pencatatan setiap transaksi keuangan yang dilakukan secara rutin, baik pemasukan maupun pengeluaran, menggunakan media spreadsheet. Setiap transaksi yang terjadi didukung dengan bukti pengeluaran yang jelas, serta dicatat secara sistematis oleh bendahara atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, laporan keuangan disusun secara berkala setiap bulan dan disampaikan kepada

pihak yayasan dalam forum rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang bersumber dari iuran santri.

Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah dijalankan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif yang cukup konsisten. Namun demikian, akuntabilitas tersebut masih bersifat sederhana karena belum didukung oleh sistem pelaporan keuangan yang lengkap dan terstandarisasi sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, seperti ISAK No. 35. Hal ini terlihat dari belum disusunnya laporan keuangan secara komprehensif seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan.

b. Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan bulanan yang disampaikan dalam rapat yayasan. Dalam forum tersebut, informasi mengenai kondisi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti ketua yayasan, pengurus, bendahara, serta pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi dalam lingkup internal sebagai bentuk transparansi organisasi.

Namun demikian, transparansi tersebut masih bersifat terbatas karena belum disampaikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti wali santri dan donatur. Akses terhadap laporan keuangan juga masih dibatasi dan hanya dapat diperoleh dengan izin dari pihak yayasan. Selain itu, belum adanya audit eksternal terhadap laporan keuangan menyebabkan tingkat transparansi yang dihasilkan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan agar lebih terbuka, sistematis, dan dapat diakses secara lebih luas.

3. Kendala yang dapat menghambat Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaporan keuangan pada pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islami

a. Kendala Akuntabilitas

Kendala utama dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan, khususnya ISAK No. 35. Hal ini menyebabkan proses pencatatan keuangan yang dilakukan masih sebatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa adanya pengelompokan akun secara sistematis. Selain itu, belum adanya sistem pencatatan berbasis akuntansi yang terstruktur juga menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif.

Kendala lainnya adalah belum diterapkannya sistem audit eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Saat ini, proses audit masih dilakukan secara internal oleh pihak yayasan, sehingga tingkat objektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan dari sisi sistem dan kompetensi pengelola keuangan.

b. Kendala Transparansi

Dalam aspek transparansi, kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses terhadap informasi keuangan yang hanya diberikan kepada pihak internal tertentu. Informasi keuangan belum disampaikan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti wali santri dan masyarakat, sehingga keterbukaan informasi masih bersifat parsial. Selain itu, belum adanya sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi menyebabkan informasi yang disampaikan belum disajikan secara lengkap dan mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan.

Kendala lainnya adalah belum adanya mekanisme publikasi laporan keuangan secara formal, seperti melalui media informasi yang dapat diakses secara luas. Hal ini mengakibatkan transparansi yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dalam kerangka good governance. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan dalam hal sistem pelaporan, akses informasi, serta penguatan kebijakan transparansi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih terbuka dan akuntabel.

4. Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan ISAK No. 35 menunjukkan bahwa praktik yang berjalan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami belum sepenuhnya sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Laporan keuangan yang disusun masih terbatas pada kas masuk dan kas keluar, sementara laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum disusun secara formal. Meskipun demikian, secara prinsip dasar pencatatan keuangan telah tersedia, sehingga menunjukkan adanya potensi pengembangan menuju penerapan standar ISAK 35 secara lebih komprehensif.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi seluruh pihak pengelolaan dan pengurus Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami, melihat begitu pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sekiranya perlu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan ISAK No. 35. Dalam hal ini, pihak pengurus serta pengelola Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami dapat mengikut sertakan

pengurusnya untuk mengikuti pelatihan serta Pendidikan khususnya pada bidang akuntansi.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang memilih tema serupa, hendaknya dapat menggunakan pendekatan teori yang berbeda untuk dapat menjelaskan fenomena terkait dengan pengelolaan keuangan pondok pesantren, sehingga akan diperoleh temuan penelitian yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan khususnya Lembaga Pendidikan seperti pondok pesantren.

